

**BANGSAWAN DI TANAH ADAT (STUDI KASUS PERUBAHAN NILAI
SOSIAL PADA BANGSAWAN DI DESA BULU TANAH KECAMATAN
KAJUARA KABUPATEN BONE)**



SKRIPSI

**ROSMIATI
10538301114**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Rosmiati**, NIM 10538301114 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 189/Tahun 1440 H/2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018.

08 Safar 1440 H

Makassar, _____

18 Oktober 2018 M

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji :

1. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

2. Jaenaluddin Amin, S.Pd., M.Pd.

3. Dr. Hj. Kuliary., Mm.

4. Sam'un Mukramin, S.Pd., M.P.D

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi



Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Bangsawan di Tanah Adat (Studi Kasus Perubahan Nilai Sosial Pada Bangsawan Di Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone).

Nama : Rosniati

NIM : 10538301114

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

08 Sa'ar 1440 H

Makassar,

18 Oktober 2018 M

Ditstipkan oleh:

Pembimbing I

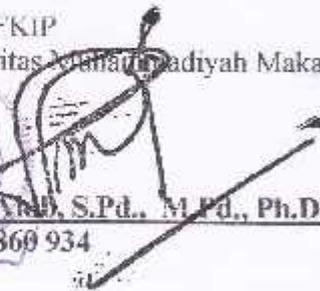
Pembimbing II


Dra. Hj. Syahribulan K, M.Pd.


Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Anas, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

ABSTRAK

Rosmiati, 2018. *Bangsawan di Tanah Adat (Studi Kasus Perubahan Nilai Sosial Pada Bangsawan di Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*. Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Hj. Syahribulan, K dan Jamaluddin Arifin.

Desa Bulutanah merupakan salah satu daerah yang didiami oleh banyak masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis dikenal dengan masyarakat yang sarat dengan kompleksitas corak budayanya. Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari masyarakat Bugis adalah sistem kemasyarakatan yang masih kental dengan sistem feodal atau tradisional. Saat ini telah terjadi pergeseran dalam hal status sosial tiga tingkatan. Masyarakat saat ini cenderung menghargai golongan *ata* (golongan ketiga) yang kaya dibandingkan dengan bangsawan (golongan pertama) tetapi miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi bangsawan dan untuk mengetahui pergeseran nilai sosial kebangsawanan terhadap posisi birokrasi, politik dan bidang kelembagaan lainnya di Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas sosial masyarakat bangsawan di Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat bangsawan di Desa Bulutanah dijelaskan bahwasanya eksistensi kebangsawanan di Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone berangkat dari suatu sejarah kerajaan Bone. Dimana golongan bangsawan yang berada pada kasta atau golongan tertinggi dan masyarakat biasa budak atau *ata*.

Kata Kunci: bangsawan, pergeseran, realitas.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

**Kesuksesan sangatlah sulit untuk dicapai
Hanya dengan usaha dan doalah
untuk menggapainya
sesungguhnya dengan usaha yang
tiada henti yang dapat membawa kita
menuju kesuksesan.**

**Kupersembahkan sebuah karya sederhana
dengan segenap cinta, kasih, dan ketulusanku
Kedua orangtuaku tercinta dan Suamiku tersayang
Saudara-saudaraku terkasih
serta sahabat-sahabatku terindah
berkat doa, kasih sayang, dan semangatmu
ku bisa berada di titik ini**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atau segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamogana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam proses menuntut ilmu, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Suami yang selalu menemaniku dalam suka dan duka dan membantu membiayai penulis, Demikian pula penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menematiku dengan canda.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd., Ph.D selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Drs.H. Nurdin, M.Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Sosiologi, selanjutnya Dra. Hj. Syahribulan, K, M.Pd dan Jamaluddin, S.Pd., M.Pd, sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini, serta seluruh dosen dan karyawan dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada P.Appe, selaku kepala Desa Bulutanah yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman seperjuanganku yang selalu menemaniku dalam suka dan duka, sahabat-sahabatku terkasih serta seluruh rekan mahasiswa angkatan 2014 pada jurusan Pendidikan Sosiologi atas segala kebersamaan, motivasi, saran dan bantuannya kepada penulis yang telah memberi pelangi dalam hidupku.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	7
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Masyarakat Adat	7
2. Nilai Kebangsawanan.....	10
3. Strata Sosial Pada Masyarakat Adat	12
4. Perubahan Sosial	15
B. Kerangka Pikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian.....	28
D. Fokus Penelitian.....	28
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Jenis dan Sumber Penelitian.....	28

G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data.....	29
I. Teknik Pengapsahan Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	32
A. Sejarah desa bulutanah.....	32
1. Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa.....	32
2. Kondisi Umum Desa Bulutanah.....	34
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	34
BAB V EKSISTENSI BANGSAWAN DI DESA BULUH	
TANAH KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN	
BONE.....	43
BAB VI PERGESERAN GELAR KEBANGSAWANAAN	
TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL.....	46
A. Tinjauan Kritis Terhadap faktor-faktor penyebab	
bergesernya bangsawanan dari prespekti	
perubahan sosial.....	46
B. Implikasinya Terhadap Perubahan Sosial.....	61
1. Bidang Sosial Ekonomi Politik.....	62
2. Bidang Agama.....	63
C. Refleksi teologis.....	63

BAB VII PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara administrasi Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan, 333 desa, 39 kelurahan, 893 dusun dan 121 lingkungan. Kabupaten Bone merupakan pusat pengembangan wilayah timur Sulawesi Selatan. Sistem Pemerintah Daerah yang telah mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Bupati Bone dalam mengemban tugas, pemerintahan dan pembangunan dibantu oleh perangkat Daerah dan lembaga teknis yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Kabupaten Bone sebagai kabupaten terluas di Sulawesi Selatan untuk saat ini, selain daya tarik sejarahnya, Kabupaten Bone juga merupakan kota multietnis. Terdapat dua etnis besar yang berdiam di Sulawesi Selatan yaitu Bugis (44,90%).

Salah satu daerah yang didiami oleh suku Bugis adalah Kabupaten Bone. Daerah ini sejak beberapa dekade yang lalu, dikenal dengan masyarakat yang sarat dengan kompleksitas corak budayanya. Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari wilayah ini adalah sistem kemasyarakatan yang masih kental dengan sistem feodal, atau tradisional, yaitu suatu gambaran relitas sosial dengan corak masyarakat dimana golongan bangsawan yang berada pada kasta atau golongan tertinggi dan masyarakat biasa budak atau ata.

Kelompok masyarakat bangsawan di Sulawesi Selatan dapat ditemui hampir di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Bone, sebuah kabupaten yang

terletak di bagian utara provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh 3 (tiga) jam dari Kota Makassar. Dewasa ini orang-orang Bugis dan Makassar bersama-sama berjumlah kira-kira 80% dari keseluruhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan orang Bugis sedikit lebih banyak.

Bahasa Bugis dan Makassar berasal dari leluhur yang sama, dan kedua kelompok itu mempunyai persamaan kebudayaan dan adat, dan terjadi kawin-mawin antara kalangan kelas atas Golongan kelas Bawah (*Fawwaz, 2011*). Sistem kekerabatan masyarakat Bugis terbagi atas tiga tingkatan. Pertama: *ana' karaeng*, menempati kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan. Tingkatan ini terdiri atas kerabat raja-raja yang menguasai ekonomi dan pemerintahan. Kedua: *tu maradeka*, kasta kedua dalam sistem kemasyarakatan Bugis. dalam orang-orang yang merdeka (bukan budak atau *ata*).

Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan mayoritas berstatus kasta kedua. Ketiga: *ata*, sebagai kasta terendah dalam strata sosial. Tingkatan ketiga terdiri dari budak/abdi yang bisaanya diperintah oleh Dua tingkatan di atasnya. Umumnya tingkatan ketiga menjadi budak karena tidak mampu membayar utang, melanggar pantangan adat dan lain-lain.

Seiring dengan perjalanan waktu ketika sistem kerajaan runtuh dan digantikan oleh pemerintahan kolonial, stratifikasi sosial masyarakat Bugis berangsur luntur. Hal ini terjadi karena desakan pemerintah kolonial untuk menggunakan strata sosial tersebut. Selain itu, desakan agama (Islam) yang melarang kalsifikasi status sosial berdasarkan kasta. Pengaruh ini terlihat jelas menjelang abad 20, dimana kasta terendah, *ata*, mulai hilang. Bahkan, sampai

sekarang kaum *ata* sudah sulit ditemukan lagi, kecuali di kawasan pedalaman yang masih dipengaruhi sistem kerajaan.

Setelah Indonesia merdeka, 2 kasta tertinggi, yaitu *ana' karaeng* dan *tu maradeka* juga berangsur mulai hilang dalam kehidupan masyarakat. Pemakaian gelar *ana' karaeng*, seperti *Karaenta*, *Petta*, *Puang* dan *Andi* masih dipakai, tetapi maknanya tidak sesakral dulu lagi. Pemakaian gelar kebangsawanan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pemilik status sosial tertinggi. Lebih banyak dipakai karena alasan keturunan dan adat istiadat.

Tiga kasta dalam masyarakat Bugis Makassar dianggap menjadi hambatan. Hal tersebut bisa dilihat dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, sedikit banyak menyudutkan stratifikasi sosial ini. Oleh karenanya, sosialisasi untuk tidak mengedepankan strata sosial lama terus digaungkan.

Saat ini gelar kebangsawanan memang masih melekat tetapi kondisi golongan ini sudah jauh berbeda dimana masyarakat yang dulunya berada pada tingkatan ketiga kadang lebih mapan dari segi ekonomi dibandingkan dengan bangsawan. Tidak ada lagi pemaknaan status yang membatasi pergaulan antara bangsawan dan golongan *ata* pada saat sekarang. Golongan *ata* juga sudah menolak disebut sebagai *ata* meski benar-benar berasal dari tingkatan ketiga.

Perkembangan kehidupan masyarakat Bugis yang cepat ikut menggerus nilai lama yang dianutnya, yaitu pengkastaan seperti yang disebutkan di atas. Hal ini terlihat jelas terutama di wilayah perkotaan. Gelar kasta tidak lagi dianggap sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial seseorang di mata masyarakat.

Telah terjadi pergeseran dalam hal status sosial tiga tingkatan melainkan saat ini lebih dipengaruhi oleh status ekonomi yang lebih berpengaruh. Saat ini ada kecenderungan dimana orang akan lebih menghargai golongan *ata* yang kaya atau masyarakat biasa tetapi kaya dibandingkan dengan bangsawan tetapi miskin. Kita akui bersama bahwa berkembangnya zaman banyak masyarakat yang menempati posisi tinggi misalnya ekonomi masyarakat biasa lebih tinggi dari pada ekonomi masyarakat bangsawan.

Harus diakui bersama bahwa perubahan zaman dan tuntutan kondisi saat ini sedikit banyaknya telah mempengaruhi kehidupan sosial kelompok masyarakat bangsawan Bugis di Sulawesi Selatan. Hal inilah yang mendorong menjadi landasan kuat melakukan penelitian dengan judul “Bangsawan di Tanah Adat (Studi Kasus Perubahan Nilai Sosial Pada Bangsawan di Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone ”.

Melakukan penelitian di Kabupaten Bone dengan judul “Bangsawan di Tanah Adat (Studi Kasus Perubahan Nilai Sosial Bangsawan di Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone “. Sebagai realitas sosial di desa tersebut bahwa tersgesernya nilai sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kesadaan ekonomi yang menggantikan posisi kebangsawanan sebagai strata tertinggi dimasyarakat desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Eksistensi Kebangsawan Di Tanah Adat Bone?

2. Mengapa Terjadi Pergeseran Nilai Kebangsawan Di Tanah Adat Bone?
3. Bagaimana Dampak Pergeseran Nilai Kebangsawan Di Tanah Adat Bone?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Eksistensi Kebangsawan Di Tanah Adat Bone!
2. Untuk Mengetahui Pergeseran Nilai Kebangsawan Di Tanah Adat Bone!
3. Untuk Mengetahui Dampak Pergeseran Nilai Kebangsawan Di Tanah Adat Bone!

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini akan diklasifikasikan dalam dua sub bagian antara lain:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan berbagai faedah, antara lain :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah makassar.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi teman- teman yang ingin menganalisa sebuah fenomena yang memiliki kemiripan dengan kasus yang peneliti angkat pada tulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Menjadi landasan dalam menganalisis masalah dinamika perubahan nilai sosial bangsawan ditanah adat dan potret interaksi sosial Golongan dengan masyarakat umum di Kabupaten Bone.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi pihak terkait untuk melakukan pengkajian implikatif bagi kebutuhan studi etnografi di wilayah Sulawesi-Selatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Masyarakat Adat

a) Masyarakat Adat

Istilah masyarakat adat sering disamakan dengan istilah masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat adat diambil dari terjemahan kata *indigenous peoples*, yang diberikan dengan istilah masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah belanda yaitu *rechtgemencsep*. Penggunaan istilah masyarakat adat maknanya lebih luas jika dibandingkan dengan istilah masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat adat mempunyai dimensi makna yang luas dari sekedar aspek hukum, padahal dari masyarakat adat mempunyai dimensi makna yang luas dari sekedar aspek hukum, padahal dari masyarakat adat sangat erat terkait dengan dimensi kultural, religi dan sebagainya. Meskipun banyak ahli yang menyatakan bahwa istilah masyarakat hukum adat hanya akan mempersempit entitas masyarakat adat sebatas entitas hukum, tetapi secara yuridis justru istilah masyarakat hukum adat merupakan istilah yang tepat, dalam kaitannya dengan kajian ilmu hukum. Istilah masyarakat hukum adat telah lazim digunakan dalam kalangan hukum adat dan memiliki ciri-ciri yang komprehensif. Hal ini didasarkan bahwa, hak masyarakat adat akan ada dimasyarakat hukum adat, bukan masyarakat adat, karena itu justru aspek hukum adat yang menjadi penentu. Kedua istilah tersebut memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan dirawat

oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah tersebut digunakan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri untuk membedakannya dengan golongan eropa dan timur jauh yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis.

Menurut Djamanat Samosir dalam buku Hukum adat indonesia, masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “istilah masyarakat tradisional” *atau the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah asyarakat adat”. Namun kemudian muncul beberapa perbedaan pemahaman tentang masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat.

Selain buku-buku yang membahas tentang kebudayaan tradisional, beberapa sumber yang terkait dengan pembahasan mengenai masyarakat hukum adat ini di antaranya yaitu UU No. 18 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 21 Tahun 2001, dan putusan Mahkamah Konsitusi No. 31/PUU-V/2007 tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Berdasar pada sumber tersebut, berikut telah kami rangkum beberapa hal penting mengenai masyarakat hukum adat dan perbedaanya denga masyarakat adat.

Pertama, masyarakat hukum adat adalah masyarakat ornik yang terkait dan mematuhi hukum adat. Biasanya mereka hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhap hal-hal f5baru yang berasal dari luar lingkungannya. Berbeda dengan masyarakat adat yang bukan

merupakan masyarakat organik, tetapi hanya sebuah komunitas yang terikat dan mematuhi adat tertentu.

Kedua, anggota masyarakat hukum adat memiliki prana pemerintahan adat, benda-benda adat, norma hukum adat, dan wilayah tertentu (biasanya disebut tanah ulayat) sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan yang telah diwariskan turun-temurun, sedangkan masyarakat adat tidak mempunyai hal-hal tersebut.

Ketiga, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Mengakui dan menghormati disini dapat di maknai bahwa semua yang terbentuk baik dari segi wilayah, pranata pemerintahan maupun norma hukum, dapat berjalan sesuai dengan apa yang diwariskan leluhur, bukan diatur dengan negara apalagi pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan masyarakat adat yang bisa dibentuk dan ditata atas kewenangan yang diberikakan pemerintah. Di beberapa daerah, masyarakat adat bahkan dimobilisasi orang-orang berkepentingan agar menuntut pemerintah menjadikan dirinya sebagai desa adat dengan klaim hak kepemilikan tanah adat/ulayat.

Masyarakat adat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interaksi personal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Dengan mengutip pendapat van Vollenhoven yang dikemukakan pada pidatonya tertanggal 2 Oktober 1901, maka Soepomo menyatakan “bahwa untuk

mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan didaerah mana pun, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari.”

Selanjutnya Soepomo berpendapat, bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut, hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan (Soepomo 1977:49).

Hampir di dalam setiap bahan bacaan mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh mengenai hukum adat, penjelasan perihal masyarakat hukum adat (yang disebut persekutuan hukum adat oleh Soepomo dan beberapa ahli hukum adat lainnya) hampir pasti ada. Hal ini menunjukkan, bahwa suatu pengantar mengenai masyarakat hukum adat, sangat diperlukan, sebelum dilanjutkan mengenai hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan.

b) Nilai kebangsawanan

Sistem kekerabatan pada suku bangsa Bugis, nampaknya masih memegang peranan penting dalam rangka membangun identitas dalam dan kehidupan bersama sebagai suatu kelompok masyarakat. Pada dasarnya, sistem kekerabatan itu, berkembang dari suatu kelompok keluarga batih (Bugis : *sianangmaranak*). Sebagai keluarga batih, mereka terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak dari ayah ibu tersebut yang hidup dalam sebuah rumah tangga. Namun demikian, dalam keluarga orang Bugis, sebuah rumah tangga, tidak hanya dihuni oleh sebuah keluarga batih, tetapi sering dijumpai, dalam sebuah rumah tangga terdapat beberapa keluarga di luar keluarga batih seperti kemanakan pihak suami

atau isteri, nenek maupun kakek dan sebagainya. Anggota kerabat ini biasa saling berkumpul dan merasa sebagai satu anggota keluarga besar manakala mereka berkumpul dalam suatu kegiatan terutama pada saat diadakan suatu upacara daur hidup, seperti sunatan, aqikah maupun perkawinan. Pada masyarakat Bugis, *wija*; merupakan kelompok kerabat yang lebih luas, yakni kelompok individu yang mempunyai hubungan darah dari seorang tokoh (nenek, kakek) yang dijadikan sebagai tokoh kebanggaan keluarga atau keturunannya. Orang Bugis, memperhitungkan garis keturunannya berdasarkan prinsip parental (bilateral), yakni hubungan yang memperhitungkan garis ayah-ibu. Sedang jika dilihat dari sudut kelangsungan hak dan kewajiban individu, termasuk pewarisan, mengikuti prinsip bilineal.

Sebutan *Andi* merupakan sebutan untuk alur kebangsawanan yang diwariskan hasil genetik (keturunan) Lapatau, pasca Bugis merdeka dari orang Gowa. Gelar ini merupakan tingkatan tertinggi pada masyarakat Bugis. Masyarakat yang memiliki gelar *andi* apabila telah menikah, secara otomatis namanya akan bertambah menjadi *Petta*. Gelar *Andi* ini dimulai ketika 24 Januari 1713 dipakai sebagai *extention* untuk semua keturunan hasil perkawinan Lapatau dengan putri Raja Bone sejati, Lapatau dengan putri Raja Luwu (yang bersekutu dengan kerajaan Gowa), Lapatau dengan putri raja Wajo (yang bersekutu dengan kerajaan Gowa), Lapatau dengan putri Sultan Hasanuddin (Sombayya Gowa), Anak dan cucu Lapatau dengan putri Raja Suppa dan Tiroang. Anak dan cucu Lapatau dengan putri raja sejumlah kerajaan kecil yang berdaulat di Celebes.

Dalam versi yang hampir sama, gelar *Andi* pertama kali digunakan oleh Raja Bone ke-30 dan ke 32 La Mappanyukki, beliau adalah Putra Raja Gowa dan Putri Raja Bone. Gelar itu disematkan didepan nama beliau pada Tahun 1930 atas Pengaruh Belanda. Gelar Andi tersebut bertujuan untuk menandai bangsawan-bangsawan yang berada dipihak Belanda dan ketika melihat berbagai keuntungan dan kemudahan yang diperoleh bagi Bangsawan yang memakai gelar “Andi” didepan namanya, akhirnya setahun kemudian secara serentak seluruh raja-raja yang berada di Sulawesi Selatan menggunakan Gelar tersebut didepan namanya masing-masing.

c) Strata Sosial Pada Masyarakat adat

Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial dalam sosiologi artinya perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang diwujudkan dalam lapisan atas, lapisan menengah dan lapisan bawah. Menurut Pitirin A. Sorokin dalam buku pengantar sosiologi, pelapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Sejak zaman dahulu, masyarakat mengakai sistem pelapisan sosial yang mempunyai kedudukan yang bertingkat ke atas.

Dengan kata lain, stratifikasi sosial ada jika ketidaksetaraan sosial melibatkan pengaturan terhadap anggota masyarakat ke dalam strata atau kelas yang tersusun bertingkat sehingga menyebabkan terjadinya kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang tidak diuntungkan (*Fulcher & Scott, 2007*).

Stratifikasi sosial dapat dipahami sebagai perbedaan kelompok orang menurut struktur rangking tertentu berdasarkan kepemilikan sumber-sumber

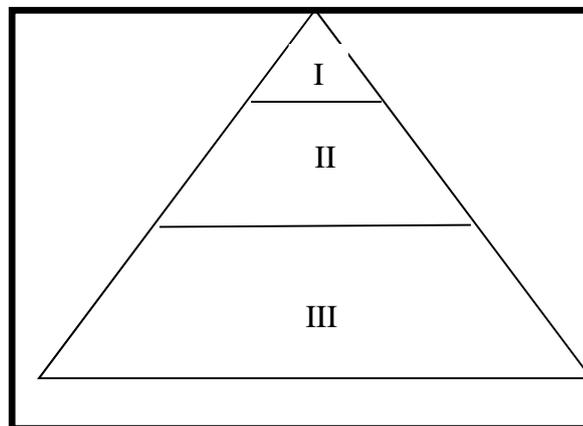
ekonomi, kekuasaan, prestise, kepercayaan dan sebagainya yang menandai adanya ketidaksetaraan di dalam masyarakat (Meinano, 2011: 188).

Pelapisan sosial yang mempunyai kedudukan yang bertingkat dari bawah ke atas. Pelapisan sosial ini terjadi baik di desa maupun di kota. Menurut Aristoteles dalam Soekanto (1990) bahwa dalam setiap Negara terdapat tiga lapisan sosial yang terdiri dari mereka yang kaya dan melarat (Soekanto, 1990: 227).

Secara umum pelapisan sosial dalam masyarakat terbagi menjadi dua proses:

1. Proses sosial yang terjadi dengan perkembangan masyarakat, sedangkan masyarakat yang tidak menyadari menciptakan kondisi tersebut.
2. Pelapisan sosial yang sengaja dibentuk untuk kepentingan bersama yang sengaja dibentuk berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal.

Kriteria umum digunakan dalam masyarakat untuk menggolongkan status seseorang mengacu pada pandangan Max Weber yang melihat pelapisan sosial berdasarkan dimensi kekayaan (ekonomi), kehormatan dan kekuasaan (Sunarto, 1993:112-126).



Gambar. 2.1 Macam-macam Pelapisan Sosial menurut Karl Marx

Keterangan gambar:

I. Lapisan sosial atas

II. Lapisan menengah

III. Lapisan bawah

Karl Marx sebagai tokoh varian Marxkian menetapkan kelas sebagai aspek sentral analisis tentang teori masyarakat dan perubahan-perubahan sosial. Antara kedua kelas itu senantiasa terdapat pertentangan kepentingan yang tidak dapat didamaikan kecuali salah satu pihak mengalami kehancuran (*Manifesto Partai Komunis, 1960: 47-64*).

Max Weber sebagai tokoh varian weberian memandang kepentingan ekonomi hanya sebagai salah satu diantara seperangkat kategori nilai yang mencakup berbagai hal, yang dalam kehidupan sehari-hari termasuk ke dalam pengertian kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang dimaksud disini adalah semua aktifitas orang dan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang langka (*Damsar, 2009*).

Menurut Soedjatmoko (1980), mudah tidaknya seseorang melakukan perpindahan status ditentukan oleh kekakuan dan keluwesan struktur sosial di mana orang tersebut hidup. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi dan hidup di lingkungan masyarakat yang menghargai profesionalisme, besar

kemungkinan akan lebih mudah menembus batas-batas lapisan sosial dan naik ke kedudukan yang lebih tinggi sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Pentingnya pendidikan yang lebih tinggi dalam masyarakat dapat dilihat jelas, dimana pendidikan tidak dapat dihindari telah menyebabkan anggota masyarakat menguasai kehidupan modern (Elly, 2011). Pendidikan pada sistem stratifikasi sosial dapat menjadi penyebab mobilitas sosial atau perpindahan status seseorang.

d) Perubahan Sosial

Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup masyarakat di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antarmasyarakat dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Masyarakat yang dulunya hanya bekerja pada sektor pertanian, saat ini sudah mulai bekerja pada sektor lain (*off-farm*). *Off-Farm* dapat didefinisikan sebagai semua pekerjaan yang dilakukan di luar usaha tani sendiri termasuk bekerja di usaha tani tetangga dan perkebunan (Saeni, 2005).

Secara garis besar, perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam dan luar dari masyarakat itu sendiri. Di antara faktor yang berasal dari dalam masyarakat seperti perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang berasal dari luar masyarakat biasanya ialah yang terjadi diluar perencanaan masyarakat seperti bencana alam.

Para sosiolog saling berbeda pendapat tentang batasan perubahan sosial. Untuk membatasinya akan dikutip definisi dari para sosiolog di antaranya:

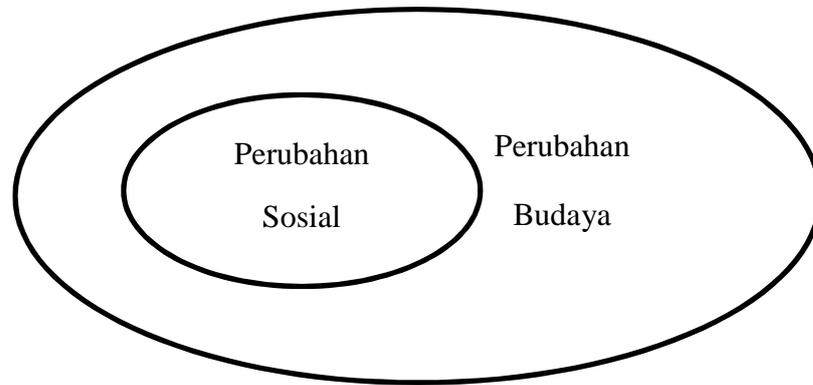
1. William Ogburn menyatakan batasan ruang lingkup perubahan sosial, mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat tidak materiil dengan menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan materiil terhadap unsur-unsur immaterial.
2. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya timbulnya pengorganisasian baru dalam masyarakat kapitalistis, menyebabkan perubahan-prubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan yang kemudian menyebabkan perubahan dalam organisasi politik.
3. Gillin dan Gillin mengartikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk,

ideologi maupun karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

4. Selo Soemardjan menyatakan perubahan sosial adalah, segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
5. Hans Garth dan C. Wright Mills mendefinisikan perubahan sosial adalah apapun yang terjadi dalam kurun waktu tertentu terhadap peran, lembaga, atau tatanan yang meliputi struktur sosial.
6. Samuel Koenigmenunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan masyarakat.

Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan hanya dapat dibedakan dengan membedakan secara tegas pengertian antara masyarakat dan kebudayaan. Dengan membedakan dua konsep tersebut, maka dengan sendirinya akan membedakan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan bagian perubahan budaya. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam perbedaan usia, tingkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat sebagai akibat terjadinya arus urbanisasi dan modernisasi. Perubahan kebudayaan jauh lebih luas dari pada perubahan sosial. Perubahan budaya menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup berorganisasi, dan filsafat. Perubahan sosial dan perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat saling berkaitan, tidak ada

masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan tanpa masyarakat.



Gambar. 2.2 Perubahan sosial merupakan bagian perubahan kebudayaan

Persamaan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan adalah keduanya berhubungan dengan masalah penerimaan cara-cara baru atau suatu perubahan terhadap cara-cara hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Kebudayaan mencakup segenap cara simbolis dan bukan muncul karena warisan biologis.

➤ Ciri-ciri perubahan sosial

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat.
2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain.
3. Perubahan yang berlangsung sangat cepat, biasanya mengakibatkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri atau

adaptasi. Disoganisasi yang di ikuti oleh proses reorganisasi akan menghasilkan pematapan kaidah-kaidah dan nilai yang baru.

4. Sesuatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spiritual saja,karna keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang kuat.Secara tipologis perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai proses sosial,segmentasi,perubahan struktural,perubahan dalam struktur kelompok.

➤ Bentuk perubahan sosial

1. Perubahan yang cepat (revolusi) dan perubahan yang lambat (evolusi)
Revolusi merupakan wujud perubahan sosial yang saling spektakuler; sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis;dan pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan pembentukan ulang manusia (Sztompka, 1994). Menurut sztompka (1994), revolusi mempunyai lima perbedaan dengan bentuk perubahan sosial yang lain.
2. Perubahan yang kecil dan perubahan yang besar. Perubahan yang kecil pada dasarnya merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat. Sebaliknya,perubahan yang besar merupakan perubahan yang membawa pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat.
3. Perubahan yang di kehendaki (direncanakan) dan perubahan yang tidak di kehendaki (tidak direncanakan). Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-

pihak yang hendak mengadakan perubahan, yang dinamakan agent of change. Agent of change merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin pada satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan yang direncanakan selalu berada di bawah kendali agent of change tersebut. Perubahan sosial yang tidak di khendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa direncanakan, berlangsung diluar jangkauan atau pengawasan masyarakat serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak di khendaki. Misalnya: pembangunan jalan tol ternyata mengakibatkan sebagian anggota masyarakat kehilangan sebagian sumber penghasilan mereka karena jalan raya yang biasanya menjadi tempat mereka berjualan menjadi sepi karena pengguna jalan raya memilih menggunakan jalan tol.

➤ Faktor Penyebab Perubahan Sosial

- Faktor yang berasal dari dalam yaitu:
 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk
 2. Penemuan-penemuan baru
 3. Pertentangan atau konflik
 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi
- Faktor yang berasal dari luar:
 1. Terjadinya bencana atau kondisi lingkungan fisik
 2. Peperangan
 3. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain

➤ Dampak Perubahan Sosial

- Dampak positif perubahan sosial
 1. Manusia semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya. Manusia semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya. Berbagai kegiatan dilakukan dalam waktu singkat; perbedaan ruang dapat diatasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, produktivitas manusia semakin tinggi.
 2. Integrasi sosial semakin meningkat. Integrasi sosial dapat muncul karena berbagai sebab, misalnya; bencana alam dan konflik sosial. Bencana alam dapat meningkatkan solidaritas sosial antara korban bencana, dan juga dengan pihak lain yang merasa simpati dengan terjadinya bencana alam tersebut.
 3. kesehatan menyebabkan kualitas kesehatan masyarakat Kualitas individu (masyarakat) semakin baik, seiring perkembangan teknologi baru. inovasi dibidang semakin terjamin; berbagai penyakit dapat di sembuhkan dengan mudah dan cepat.
 4. Mobilitas sosial semakin cepat. Mobilitas sosial ini disebabkan tingkat pendidikan yang semakin baik, kualitas individu semakin meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi, dan sebagainya.
 5. Pola pikir manusia semakin berkembang melalui pertukaran budaya, pertukaran informasi yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

- Dampak negative perubahan sosial
 1. Peningkatan angka kemiskinan
 2. Jumlah pengangguran semakin tinggi
 3. Peningkatan angka kriminalitas
 4. Terjadi konflik sosial
 5. Individualitas semakin meningkat
 6. Pencemaran lingkungan

Teori klasik dan modern mengenai perubahan sosial. Teori klasik dalam sosiologi dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan (sosiologi), kemudian teori ini juga menjadi dasar munculnya teori-teori yang lahir sesudahnya, termasuk lahirnya teori modern. Kajian mengenai sosiologi sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-14, diawali dengan pemikiran Ibnu Khaldun (lahir tahun 1332). Meskipun Khaldun tidak menyebut pemikirannya adalah pemikiran yang sosiologis. Ia tidak memakai terminologi sosiologis, namun sebenarnya pemikirannya sangat sosiologis. Ia tidak memakai terminologi sosiologi, namun ia menggunakan banyak konsep sosiologi, seperti konsep masyarakat dan solidaritas sosial. Pemikiran Khaldun juga dikenal dalam disiplin ilmu politik, agama, sejarah, dan filsafat.

Menurut Mac Iver, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Perubahan menurut Gillin dan Gillin dianggap sebagai suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun

penemuan-penemuan dalam masyarakat. Koenig mendefinisikannya sebagai modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Hawley menjelaskan perubahan sosial sebagai sebuah perubahan yang tidak teruang dari system sosial sebagai satu kesatuan. Munandar mendefinisikan perubahan sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat. Menurut Soemarjan, perubahan sosial meliputi segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Moore mendefinisikan perubahan sebagai perubahan penting dalam struktur sosial, yaitu: pola-pola perilaku dan interaksi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Menurut Maceonis, perubahan sosial merupakan transformasi dalam organisasi masyarakat dalam pola berfikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. Konsep perubahan sosial menurut Ritzer mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Terakhir menurut Lauer, perubahan sosial dimaknai sebagai perubahan fenomena sosial diberbagai tingkat di kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu-individu sampai dengan tingkat dunia (Lauer, 1982; Moore, 1963; Soekanto'1989' 1999; Horton dan Hunt,1992; Sanderson,1993; Stztompka,1994; Sunarto, 2004; Henslin,2011).

Menurut Harper (1989) perubahan sosial didefinisikan sebagai pergantian (perubahan) yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Perubahan di dalam struktur ini mengandung beberapa tipe perubahan struktur sosial, yaitu: *pertama*, perubahan dalam personal yang berhubungan dengan

perubahan-perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia yang berkaitan dengan keberadaan struktur. Perubahan dalam tipe ini bersifat gradual (bertahap) dan tidak banyak unsur-unsur baru maupun unsur-unsur yang hilang. Perubahan ini dapat dilihat misalnya dalam perubahan peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat. Jika sebelumnya diposisikan sebagai subjek yang memegang peran dan fungsi di wilayah domestik (di dalam rumah), namun sebagaimana dapat dilihat dalam masyarakat modern, perempuan sudah ikut berperan serta dalam wilayah public yang sebelumnya hanya di tempati laki-laki. Tentu saja perubahan ini membawa berbagai konsekuensi, seperti dalam masalah pengasuhan anak, harmonisasi keluarga, dan sebagainya.

Kedua, perubahan dalam cara bagian-bagian struktur sosial berhubungan. Perubahan ini misalnya terjadi dalam perubahan alur kerja birokrasi dalam lembaga pemerintahan. Jika sebelumnya sistem kerja aparat pemerintah masih dalam perubahan alur kerja aparat pemerintah masih manual (menggunakan tenaga manusia) maka sekarang dapat dilihat hampir berbagai sistem pelayanan pemerintahan telah tergantikan secara mekanis menggunakan teknologi canggih, sehingga segala sesuatu menjadi serba *online*. Hal ini memengaruhi perubahan cara kerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada public.

Ketiga, perubahan dalam fungsi-fungsi struktur, berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat dan bagaimana masyarakat tersebut melakukannya. Pada masyarakat tradisional, keluarga memegang peran penting dalam menjalankan fungsi pendidikan, karena pada saat itu pendidikan masih berfokus dalam masalah transfer nilai antara orang tua dengan anak. Seiring perkembangan jaman, peran

untuk memberikan pendidikan telah tergantikan lembaga pendidikan diluar keluarga, yaitu sekolah. Sekolah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat modern.

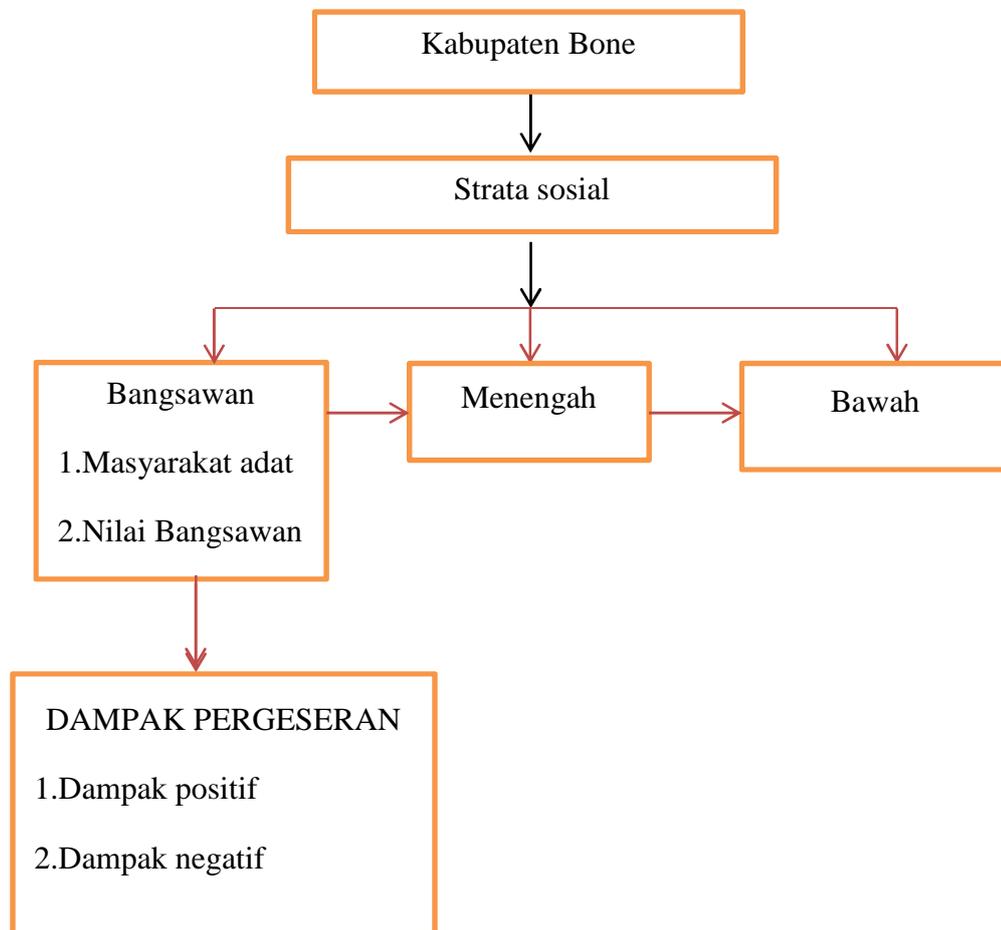
Keempat, perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda. Lembaga pendidikan dalam masyarakat indstri memiliki fungsi menyiapkan tenaga kerja untuk kepentingan industry. Hal ini mengakibatkan adanya saling keterkaitan antara lembaga pendidikkkan dengan dunia usaha, substansi (muatan) pendidikan pada saat sekarang lebih diarahkan untuk menyesuaikan kondisi atau kebutuihan dunia kerja.

Kelima, kemunculan struktur baru, yang merupakan peristiwa munculnya sturuktur baru untuk menggantikan sturuktur sebelumnya. Perubahan dalam hal ini dapat dilihat misalnya munculnya KPK. Pemberantasan korupsi pada awalnya menjadi tugas kepolisian, namun dengan terbentuknya KPK, peran kepolisian dalam melakukan penyeledikan masalah korupsi telah tergantikan.

B. Kerangka Pikir

Dengan memperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang dipaparkan sebelumnya.

Untuk itu penulis menguraikan landasan berpikir pada di bawah ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini membutuhkan cara yang lebih mendalam dan luwes dalam menggali data, lebih-lebih yang berkaitan dengan bangsawan di tanah adat Bone.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *teknik snowball* yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan dengan mendatangi terlebih dahulu masyarakat yang dianggap bisa memberikan informasi tentang informan yang dianggap bisa memberikan informasi terkait dengan masalah penelitian.

Informan penelitian awal yang dipergunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria:

1. Bangsawan

penelitian ini adalah orang-orang yang tergolong dalam kelompok bangsawan di tanah adat Bone. Selain itu teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu peneliti sendiri yang memilih sampel dengan melihat kriteria atau memperhitungkan bisa memberikan informasi. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri atas 2 sampai 3 orang.

2. Non Bangsawan/masyarakat biasa

penelitian ini adalah orang-orang yang tergolong dalam kelompok masyarakat biasa di tanah adat Bone. Selain itu teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu peneliti sendiri yang memilih sampel dengan melihat kriteria atau memperhitungkan bisa memberikan informasi. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri atas 2 sampai 3 orang.

E. Fokus Penelitian

1. Eksistensi Kebangsawanan Di Tanah Adat Bone.
2. Terjadi Pergeseran Nilai Kebangsawanan Di Tanah Adat Bone.
3. Dampak Pergeseran Nilai Kebangsawanan Di Tanah Adat Bone.

D. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Untuk mengamati secara langsung bagaimana Eksistensi Kebangsawanan di Tanah Adat Bone, peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara.

2. Untuk mengetahui Pergeseran Nilai Kebangsawanan di Tanah Adat Bone, peneliti menggunakan tehnik wawancara.
3. Untuk mengetahui Dampak Pergeseran Nilai Kebangsawanan di Tanah Adat Bone, peneliti menggunakan tehnik wawancara.

E. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi di Kota Makassar. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang dihadapi (diselidiki), baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan.

b. Interview / wawancara

Interview / wawancara adalah merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dan subyek yang diteliti atau responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data dengan cara menggali kumpulan data verbal, baik yang berbentuk tulisan atau tidak.

G. Teknik Analisis Data

Konsep dasar dalam analisis data sebuah penelitian kualitatif terdiri dari beberapa yang harus di jadikan sebagai pondasi dalam penelitian. Dasar tersebut diantaranya :

1. Proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.
2. Selajutnya data-data yang telah dikondisikan tersebut, peneliti dapat menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantive.
3. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan uji data atau memverifikasi teori yang sedang berlaku sehingga proses analisis data secepatnya dilakukan.
4. Setelah proses tersebut dilaksanakan peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan.

H. Teknik Pengabsahan Data

Uji kredibisahan data dalam penelitian yaitu:

1. Uji Kredibilitas menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif.

2. Pengujian Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah di dapat, maka memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.
3. Pengujian dependability disebut reabilitas, dalam penelitian ini, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing mangaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian.
4. Pengujian confirmability dalam penelitian ini disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Bulutanah

1. Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa

Desa bulutanah merupakan salah satu Desa dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Kajuara kabupaten Bone. Desa Bulutanah 3 Dusun yakni Dusun cangkano, kaccope, jawi-jawi. kajuara adalah salah satu Desa penghasil produk-produk pertanian dan perkebunan. Berikut adalah gambaran tentang perkembangan Desa Bulutanah.

Tabel 2. Perkembangan Desa Bulutanah

Tahun	Peristiwa
1961-1974	bulutanah awlnya membawahi wilayah kampung cangkano,kaccope. Komoditas utama penduduk Bulutanah adalah Padi. Karena pada saat itu belum ada akses transportasi sehingga kendaraan umum penduduk adalah kuda. Pada zaman ini Desa Bulutanah di Kepalai oleh Muh. Jusal .
1974	Setelah A. Ramli Petta Intang mengakhiri Pemerintahannya, maka pemerintah wilayah Kecamatan menunjuk Andi Page Petta Renring untuk menjabat sebagai kepala Desa, namun tidak

	belangsung lama jabatan diserahkan kepada Petta Baso, kemudia di limpahkan lagi kepada a. Idris.
1975-1983	Jabatan Kepala Desa di duduki oleh A. Pawellangi.
1984-1992	Masa jabatan A. Pawellangi berakhir, pemilihan kepala Desa dilakukan dengan Dua calon yakni A. Pawellangi dengan Syamsuddin . hasil pemilihan menunjukkan keunggulan Syamsuddin, maka ditetapkanlah Syamsuddin sebagai kepala Desa.
1992-1993	Syamsuddin hanya mampu menjalankan separuh masa jabatannya, oleh sebab itu selaku sekertaris Desa A. Kamaruddin ditunjuk selaku pelaksana tugas sampai akhir masa jabatan.
1994-2002	A. Kamaruddin kembali terpilih setelah mengalahkan kedua rikalnya A. Massiara dan A. Hasdar.
2003-2008	Untuk kedua kalinya A. Kamaruddin Kembali terpilih dengan mengungguli Drs. A. Surya dan Muhtar Abu.
2009- Sekarang	Drs. A. Suraya memperoleh suara terbanyak setelah A. Malla. M dan Zainuddin.

Sumber : Mahmud (Kaur Pemerintah Desa Bulutanah

2. Kondisi Umum Desa Bulutanah

a. Geografis

Desa Bulutanah Merupakan salah satu dari 17 Desa di Wilayah Kecamatan Kajuara dengan luas wilayah seluas \pm 1.091 Hektar. Batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara adalah Desa kawerrang
- 2) Sebelah Timur adalah Desa lappamancing
- 3) Sebelah Selatan adalah Desa bontobolaeng
- 4) Sebelah Barat adalah Desa malemongeng

b. Iklim

Iklim Desa Bulutanah sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan Penghujan.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Bulutanah terdiri atas 569 KK, 547 RT dengan total jumlah jiwa 3.076 orang yang tersebar dalam 3 wilayah Dusun dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Bulutanah

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	Cangkano	567
2	Kaccope	478
3	Jawi-jawi	763
	Jumlah penduduk	1785 Orang

Sumber: Dokumen Rancangan pembangunan Jangka Menengah Desa (2018)

a) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Bulutanah dibagi menjadi beberapa tingkatan antara lain pendidikan pra sekolah, Sekolah Dasar, SMP, SMA dan sarjana.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pra sekolah	412 orang
2	SD	958 orang
3	SMP	1190 orang
4	SMA	1182 orang
5	Sarjana	25 orang

Sumber: Dokumen Rancangan pembangunan Jangka Menengah Desa (2011)

Saat ini masyarakat Desa Bulutanah yang belum menempuh pendidikan dasar sebanyak 412 orang, Sekolah Dasar sebanyak 958 orang, SMP sebanyak 1190 orang, SMA sebanyak 1182 orang sedangkan sarjanah sebanyak 25 orang.

b) Mata Pencaharian

Desa Bulutanah merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 5. Tingkat Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	3921 orang
2	Pedagang	132 orang
3	PNS	30 orang
4	Buruh	15 orang
5	Lainnya	-

Sumber: Dokumen Rancangan pembangunan Jangka Menengah Desa (2011).

Berdasarkan keterangan dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk desa Bulutanah pekerjaan utama masyarakatnya adalah bertani, jumlah petani di desa Bulutanah adalah 3921 orang, pedagang 132 orang yang mana pedagang merupakan pekerjaan ke dua atau merupakan pekerjaan sampingan oleh masyarakat desa Sanrego. PNS sebanyak 30 orang, dan buruh sebanyak 15 orang.

c) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Bulutanah sebagian besar diperuntukan sebagai tanah pertanian sawah sedangkan sebagian sisanya untuk tanah kering yang merupakan tempat untuk mendirikan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

d) Pemilik Ternak

Penduduk Desa Bulutanah selain bekerja sebagai petani, penduduk di Desa ini juga memelihara ternak. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Bulutanah adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kepemilikan Ternak

Jenis Ternak	Jumlah
Ayam / itik	3250 orang
Kambing	27 orang
Sapi	1500 orang
Lain-lain	-

Sumber: Dokumen Rancangan pembangunan Jangka Menengah Desa (2011).

Selain bertani penduduk desa Sanrego juga memilih untuk memelihara ternak, penduduk desa Sanrego yang memelihara itik dan ayam sebanyak 3250 orang, yang memelihara kambing 27 orang, dan yang memelihara sapi adalah 1500 orang.

e) Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bulutanah secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Prasarana Desa

No	Prasarana Desa	Jumlah
1	Balai Desa	1 unit
2	Jalan Kabupaten	1 poros
3	Jalan Kecamatan	-
4	Jalan Desa	6 jalan
5	Mesjid	7 unit

Sumber: Dokumen Rancangan pembangunan Jangka Menengah Desa (2011).

Prasarana sebuah desa juga sangat penting untuk kebutuhan masyarakatnya, prasarana desa Bulutanah adalah balai desa sebanyak 1 unit, jalan kabupaten yang merupakan jalur untuk mengakses ke kabupaten Bone dari desa Bulutanah yaitu 1 poros, jalan desa sebanyak 6 jalan dan Mesjid yang merupakan tempat ibadah dan harus dimiliki oleh setiap daerah, dan desa Bulutanah memiliki 7 unit Mesjid.

B. Gambaran Bangsawan Bugis Di Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Andi sebagai gelar yang digunakan para bangsawan Bugis. Sebutan “Andi” adalah sebutan alur kebangsawanan yang diwariskan hasil genetis (keturunan) Lapatau, pasca Bugis merdeka dari orang Gowa.” Andi” ini dimulai ketika 24 Januari 1713 dipakai sebagai *extention* untuk semua keturunan hasil perkawinan

Lapatau dengan putri Raja Bone sejati, Lapatau dengan putri Raja Luwu (yang bersekutu dengan kerajaan Gowa), Lapatau dengan putri raja Wajo (yang bersekutu dengan kerajaan Gowa), Lapatau dengan putri Sultan Hasanuddin (Sombayya Gowa), Anak dan cucu Lapatau dengan putri Raja Suppa dan Tiroang. Anak dan cucu Lapatau dengan putri raja sejumlah kerajaan kecil yang berdaulat di Celebes.

Gelar Andi, menurut Susan Millar dalam bukunya '*Bugis Weddings*' (telah diterbitkan oleh Ininnawa berjudul (Perkawinan Bugis) disinggung bagaimana proses lahirnya gelar Andi itu. Memang, seperti yang disinggung di atas, saat itu Pemerintah Belanda di tahun 1910-1920an ingin memperbaiki hubungan dengan para bangsawan Bugis dengan membebaskan keturunan bangsawan dari kerja paksa.

Saat itu muncul masalah bagaimana menentukan seorang berdarah bangsawan atau tidak. Akibatnya, berbondong-bondonglah warga mendatangi raja dan menegosiasikan diri mereka untuk diakui sebagai bangsawan, karena rumitnya proses itu maka dibuatlah sebuah gelar baru untuk menentukan kebangsawanan seseorang dengan derajat yang lebih rendah, di pakailah kata Andi untuk menunjukkan kebangsawanan seseorang dalam bentuk sertifikat (mungkin sejenis sertifikat yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah lulus dalam kursus montir mobil atau sejenisnya).

Adapun gelar Andi, pertama-tama yang menggunakannya adalah Andi Mattalatta untuk membedakan antara pelajar dari turunan bangsawan dan rakyat

biasa. Dan gelar Andi inilah yang diikuti oleh turunan bangsawan Luwu dan Makassar. Jadi di zaman Andi Mattalatta gelar ini muncul.

Secara umum Bangsawan Bugis berasal dari pemimpin-pemimpin anang/kampung/*wanua* sebelum datangnya *To Manurung/To Tompo*. Pimpinan-pimpinan kampung ini yang selanjutnya disebut kalula/arung dengan nama alias/gelar berbeda-beda yang disesuaikan dengan nama kampung/kondisi/perilaku bersangkutan yang dia peroleh melalui pengangkatan/pelantikan oleh sekelompok anang/masyarakat maupun secara kekerasan (peperangan bersenjata) yang selanjutnya diwariskan secara turun-temurun kepada ahli warisnya, kecuali jika dikemudian hari ternyata dia ditaklukkan dan diganti oleh penguasa yang lebih tinggi/kuat. Masyarakat Bugis dibagi dalam kelas sebagai berikut :

1. Lapisan Bangsawan (*Ana'arung/Ana'karaeng*)
2. Lapisan Masyarakat Merdeka (*To Maradeka/Tumaradeka*)
3. Lapisan Hamba/Budak (*Ata*)

Lapisan di atas pada intinya masih memiliki klassifikasi kualitas yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Lontara Latoa, yaitu klassifikasi tingkatan pada masing-masing lapisan masyarakat. Hal ini penting terutama dalam persoalan suksesi pemerintahan dimana pemegang hak utama terdapat pada lapisan Bangsawan kelas tertinggi yang disebut *Ana'pattola* atau *Ana'ti'no*.

Kebangsawanan atau stratifikasi sosial lapisan atas dalam perjalanan sejarah Sulawesi Selatan ditemukan adanya dua sumber. Yang pertama, lapisan bangsawan yang berdasar pada sejarah keturunan leluhurnya menurut takaran adat istiadat, hal mana lapisan ini mulai dikenal sejak kedatangan Tomanurung, dan keturunan langsung Tomanurung inilah yang merupakan sebuah lapisan tersendiri yang disebut bangsawan. Yang kedua adalah faktor kondisi dan keadaan yang dipaksakan artinya menduduki lapisan sebagai bangsawan karena kedudukan yang diberikan oleh Belanda sebagai penjajah yang menguasai kebijakan politik.

Pada unsur yang pertama dapat diketahui dengan menelaah silsilah leluhurnya berdasarkan lontara panguriseng (lontara silsilah). Jika seseorang adalah keturunan Tomanurung dan dalam perkembangan keluarganya tetap menjaga aturan wari' (stratifikasisosial) maka orang tersebut dikatakan sebagai lapisan bangsawan asli. Di lain pihak meski adalah keturunan Tomanurung namun dalam proses perkembangannya tidak lagi menjaga aturan wari' maka dikatakan kebangsawanan orang tersebut telah luntur (tuasa, Bahasa Makassar, atau malawi', Bahasa Bugis) dan stratifikasinya bergeser ke stratifikasi sosial yang lebih rendah.

Pada Unsur kedua adalah kebangsawanan yang bukan bersumber dari Tomanurung, tetapi merupakan bangsawan ciptaan Kolonial Belanda sebagai pemegang kekuasaan politik dalam masa penjajahan, sehingga seseorang karena diberi kedudukan oleh Belanda sebagai seorang raja 'boneka', menempatkannya pada strata kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat hingga keturunannya yang merupakan hasil imitasi.

BAB V

EKSISTENSI BANGSAWAN DI DESA BULUTANAH KECAMATAN

KAJUARA KABUPATEN BONE

Berdasarkan hasil observasi atau pertemuan dilapangan terkait dengan eksistensi bangsawan di desa Bulutanah kecamatan kajuara kabupaten bone bahwa berangkat dari sejarah Kerajaan Bone mengambil alih peran politik dan sosial Kerajaan Gowa pasca-Perjanjian Bungaya pada tahun 1667, wilayah Sulawesi Selatan hampir seluruhnya dikuasai oleh elite bangsawan Bone. Perkawinan politik yang dibangun oleh Arung Palakka dengan 186 Masyarakat Indonesia mengawinkan kemenakannya, La Patau, dengan putri penguasa Kerajaan Gowa dan Luwu, telah membuat darah bangsawan Bone menyebar hampir di seluruh pelosok Sulawesi Selatan. Jaringan kekuasaan melalui ikatan perkawinan antar daerah telah memperluas kontrol Bone dan itu berlanjut setelah Indonesia merdeka.

Posisi bangsawan Bone menjadi penting di wilayah Sulawesi Selatan dan bahkan setelah Indonesia merdeka. Mereka memegang kuasa politik di wilayah ini, dibuktikan dengan posisi Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama yang merupakan keturunan bangsawan Bone. Peristiwa yang terjadi di abad XIX memberi warna lain bagi kerajaan dan bangsawan Bone, yakni beralihnya strategi politik; dari politik kompromi ke politik protes. Selain melawan Inggris, elite penguasa Bone juga menolak kehadiran Pemerintah Hindia Belanda. Tetapi kemudian bangsawan Bone terpecah dua. Di satu pihak menolak kehadiran Belanda, di pihak lain menerima kehadiran Belanda.

Bapak Ilham sebagai masyarakat Bulutanah mengatakan bahwa : Kerajaan di bone memiliki kekuasaan yang tinggi tapi karena adanya perubahan kerajaan di bone tergantung oleh masyarakat-masyarakat biasa yang memiliki banyak harta.

Pada waktu status Kerajaan Bone diubah menjadi “Kerajaan Pinjaman” pada tahun 1860, raja yang ditunjuk untuk menduduki tahta Kerajaan Bone harus mendapat izin dan persetujuan Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun demikian, para bangsawan Bone masih tetap memiliki celah untuk tetap dapat bertahan. Pada waktu pemerintah Hindia-Belanda sedang melakukan pasifikasi ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal, Van Heutz (Poelinggomang 2004:46), Kerajaan Bone menjadi target utama karena dianggap terkuat dan berbahaya. Pada tahun 1905 serangan pun dilancarkan dengan kekuatan penuh tanpa melibatkan kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan.

Bapak Ashar sebagai masyarakat bulutanah mengatakan bahwa, Bangsawan atau keturunan andi di bone posisinya sangat di hormati dan di takuti karena sejak dulu memiliki kesempatan yang banyak untuk menduduki sebagai pemimpin baik itu pada pemerintahan adat maupun pemerintahan modern seperti kepala desa, camat, bahkan bupati.

Kerajaan Bone takluk kepada Belanda dan para elite bangsawannya dipinggirkan. Pada tahun 1916, pemerintah Hindia Belanda memberi Kerajaan Bone status *zelfbestuur*. Para elit bangsawan dirangkul kembali dan diberi tempat untuk menduduki jabatan-jabatan yang selama ini ditiadakan, meskipun harus diketahui bahwa bangsawan yang dirangkul itu adalah mereka yang telah menunjukkan loyalitas yang tinggi. Bagi bangsawan yang dianggap berbahaya tetap disingkirkan. Dalam perkembangan berikutnya bangsawan berhasil

membujuk Pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkat kembali seorang raja di Kerajaan Bone pada tahun 1931, yang selama ini kosong sejak raja Bone, La Pawawoi Karaeng Segeri, ditangkap pada tahun 1906. EDISI XXXVII / NO.1 / 2011 | 187 Pada masa pendudukan Jepang, Kerajaan Bone dan para elite penguasanya dirangkul oleh Jepang. Dibentuk satu wadah yang dikenal dengan nama Sumber Dara Rakyat yang disingkat menjadi Saudara. Bangsawan Bone yang mempunyai pengaruh besar ditun 188 Masyarakat Indonesia.

BAB VI

PERGESERAN GELAR KEBANGSAWANAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL

Dalam bab ini penulis akan memaparkan analisa kritis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran gelar kebangsawanan di Bulutanah dan implikasinya terhadap perubahan sosial dalam masyarakat setempat.

A. Tinjauan Kritis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Bergesernya Gelar Kebangsawanan dari Perspekti Perubahan Sosial.

Masyarakat menurut Georg Simel, muncul melalui interaksi timbal-balik. Dimana pola-pola "sosiasi" (sociation), yang adalah terjemahan dari kata Jerman *Vargesellschaftung*, yang secara harafiah berarti "proses dimana masyarakat itu terjadi." Sosiasi ini meliputi interaksi timbal-balik. Melalui proses inilah masyarakat itu muncul. Di mana individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian dapat dilihat bahwa masyarakat Bulutanah itu sendiri muncul karena adanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Adanya interaksi timbal-balik ini sebabkan karena adanya kepentingan individu-individu dalam masyarakat yang kemudian di proyeksikan dalam berbagai norma, nilai, aturan, pembentukan kerja, dan lain-lain. Gelar kebangsawanan di Bulutanah adalah suatu bentuk hasil dari hubungan timbal balik dalam masyarakat tersebut. Jadi adanya hubungan saling ketergantungan antara bangsawan, orang merdeka dan hamba. Ketergantungan dalam ikatan pekerjaan, pemerintahan, dan hukum dalam kampung.

Dalam sejarah, gelar ini sarat dengan nilai dan makna yang yakini oleh masyarakat Bulutanah pada zamannya. Bukan hasil keputusan individu itu sendiri tetapi hasil kesepakatan untuk mencapai berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Hasil kesepakatan pada waktu itu di pelihara terus dengan di berlakukan berbagai aturan yang akan terus memperkokoh solidaritas dalam masyarakat sumba pada waktu itu. Nampak dengan diberlakunya pernikahan *ana tuya* dan pernikahan antar strata yang sama aturan ini terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari perilaku diatas dapat kita pahami bahwa gelar social tersebut dapat dikatakan budaya masyarakat Bulutanah.

Bapak Appe Sebagai Kepala Desa Bulu tanah, mengatakan:

Kebudayaan adalah warisan social yang mereka terima dan teruskan.

Clifford Geert, juga memiliki konsep:

Kebudayaan suatu pola makna-makna yang ditruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol, suatu konsep-konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk simbolis yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap- sikap terhadap kehidupan.

Gelar tersebut tercermin dalam struktur sosial yang ada dalam sistem sosial masyarakat Bulutanah yang terus diwarisi sebagai warisan budaya. bagqaimana tidak, gelar gelar social ini terus diinternalisasikan dari generasi ke generasi dalam segmen kehidupan bermasyarakat di Bulutanah. Sudah barang tentu, warisan tersebut memiliki makna-makna yang menjadi warisan

historis yang terwujud dalam “status kebangsawan, orang merdeka dan hamba” yang kemudian di terjemahkan oleh mereka dalam struktur social yang ada dalam sistem social Bulutanah. Bisa saja akan terciptanya keteraturan, tolong menolong, kerjasama antar struktur yang menopang stabilisasi masyarakat pada waktu itu. Bapak Sudding sebagai masyarakat Bulutanah, mengatakan:

Apa yang bisa disebut sistem adalah suatu bstruktur yang mengandung seperangkat aturan, norma dan tradisi sebagai pedoman untuk melakukan tindak dan aktivitas. Di dalam struktur tersebut terkandung unsur *value, status position dan institution*. (parillo, 1987:27). Menurut perpektif ini, masyarakat menjadi *organized* samping karena keserasian hubungan antar bagian juga di dukung oleh seperangkat pengharapan/tujuan dan seperangkat aturan. (julian 1986:13).

Sztompka dalam Bab II mengatakan, perubahan sosial adalah gejala yang akan terus terjadi atau proses yang terjadi dalam suatu masyarakat dalam sistem sosialnya, yang kemudian saling mempengaruhi setiap unsur dalam sistem, yang melibatkan dimensi ruang, waktu yang berbeda dalam masyarakat, sifatnya tidak tetap atau senantiasa bergerak.

Sistem social yang berlaku pada waktu itu di Bulutanah adalah bentuk sistem pemerintah *monarki* yakni sistem pemerintahan kerajaan, yang terus bergulir dalam satu kerajaan berdasarkan garis keturunan dan akan digantikan saat ajal menjemput. Terdapat pula sturuktur dalam sistem tersebut. Struktur dapat digambarkan sebagai hierarchy masyarakat yang memuat pengelomppokan masyarakat berdasarkan bagian-bagian atau kelas-kelas tertentu (*elite, middle dan lower class*).

Dahulu, sistem pemerintahan seperti ini, diperkuat pada masa penjajahan VOC tepatnya pada tahun 1913, bangsawan inilah yang diakui jadi raja yang memimpin satu *paraingu*. Anak-anak dari golongan bangsawan inilah yang boleh mengecap bangku pendidikan yang dibuka oleh pemerintah. Pada masa awal pemerintahan republik indonesia, para raja atau bangsawan tetap diakui kedudukan dan kekuasaannya. Baru pada tahun 1958, kekuasaan para raja berakhirdan raja yang masih memerintah dimasukkan ke dalam status pegawai negeri. Persinggungan gelar cultural dengan sistem pemerintah yang baru juga bisa disebabkan karena hal ini.

Ini tidak berlangsung lama karena persyaratan untuk masuk kedalam sistem pemerintahan Negara Indonesia berbeda. Bukan berdasarkan golongan darah “bangsawan” yang selalu diperlakukan khusus. Hal ini menyebabkan berubahnya fungsional setiap struktur dalam sistem yang lama. Sztopka dalam Bab II mengatakan perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan social, lembaga dan struktur social pada waktu tertentu. Berubahnya sistem, struktur pun dalam sebagian daerah yang dikuasai oleh raja juga mengalami perubahan.

Fungsional bangsawan pun mulai bergeser karena ini. Dalam Bab II Sztopka mengutip, adanya modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat (Persell, 1987: 586). Adanya transformasi ini lewat munculnya para pengatur pemerintah daerah baru, berbagai lembaga pemerintahan, swasta yang masuk ke Bulutanah yang kemudian mengatur dan menguasai daerah Bulutanah.

Bukan hanya itu saja, fungsional golongan bawah ‘ata’ juga mulai bergeser. Bapak asri menyebutkan sebagai masyarakat Bulutanah bahwa:

Feodalisme para bangsawan atau raja makin terpuruk. Pemerintah Hindia Belanda Memperluas kekuasaan para bangsawan atau raja. Kekuasaan legislative. Eksekutif. Dan vudikatif berada dalam tangan mereka. Para bnagsawan atau raja hidup dari penindasan dan pemesaran terhadap rakyat.

Terbukti dalam catatan Pak Asri di atas bahwa terpuruknya fungsional bansawan pada saat pemerintah hindia belanda menyerahkan kekuasaan pada bangsawan secara penuh. Sistem yang pada awalnya baik, menjadi tidak berfungsi dentan baik. Nampaknya faktor politik yang menjadi faktor pergeseran ini. Keinginan konolialisme Belanda untuk mengontrol masyarakat lewat kepemimpinan nbangsawan “strategi penguasaan kolonial.” Bangsawan atau raja-raja yang diangkat untuk berkuasa dalam wilayah-wilayah, memanfaatkan ini untuk mengusai daerah-daerah lainnya untuk ditaklukkan dan orang-orang yang menjadi bawahannya.

Hal ini di perkuat dengan facta social yang ada sekarang, di mana starata paling bawah “ hamba” banyak yang membebaskan diri dan lari dari tuanya. Para hamba ini mulai memperlihatkan hilangnya fungsionalitas sturukturnya dalam sistem tersebut. Pendukung aliran fungsinalisme bertolak dari pendirian dasar bahwa:

Masyarakat itu suatu sistem perimbangan, di mana setiap kelompok memberikan sumbangannya yang khas melalui pernanya masing-

masing yang telah ditentukan demi lestarnya sistem perimbangan sebagai keseluruhan. Arti dan makna dari sebuah kegiatan social hanya dimengerti dengan baik apabila orang dapat menemukan setempatnya tempat dan fungsinya dan dalam keseluruhan sistem social. Dalam kerangka pemikiran itu timbul suatu bentrokan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam subbagian (baca institusi-institusi) yang tidak berjalan baik.

Faktor pembentukan Negara Indonesia juga merupakan musabab perubahan fungsional bangsawan. Karena sumba timur termasuk bagian didalam negara kesatuan repoblik indonesia. Repoblik dengan pemerintahan terpusat, memiliki kepala Negara, kostitusi, membuat kerajaan-kerajaan di nusantara, termasuk raja-raja di sumba timur dengan sistem herarkinya, harus tunduk pada consensus bangsa ini yang condong kedarah demokratis.

Sistem pemerintah baru oleh pemerintah Negara Indonesia, yang disosialisasikan dalam masyarakat Bulutanah, diikuti dengan munculnya pembangunan lembaga-lembaga instansi pemerintah dan sebagainya, sudah barang tentu mengubah ideologi tradisional sebagian orang Bulutanah. Syarat yang berlaku ketentuan formal pemerintah.

Pendidikan adalah tonggak awal untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Definisi pendidikan dipaparkan Ibu Hasriani dalam bukunya:

Prof. Langevels, Pakar pendidikan dari Belanda ini mengemukakan, bahwa pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan.

Dalam masyarakat Bulutanah ibu Hasriani mengemukakan, bahwa definisi pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan

kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup.

Dari berbagai definisi di atas memperkuat faktor pendidikan sebagai indikasi, bergesernya ideologi tradisional tentang keistimewaan bangsawan. Orang menyadari bahwa untuk menjadi pionir, mencapai tujuan hidup, mengembangkan keibadian yang kompeten dalam masyarakat, mengembangkan kemampuan intelektual manusia, mengetahui nilai-nilai kemanusiaan, sehingga manusia dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik itu dengan pendidikan.

Perubahan terjadi karena adanya ketegangan internal yang kemudian mengemukakan persoalan akan adanya kebutuhan mutlak dari individu dalam masyarakat. Ketegangan yang dimaksudkan bukan ketegangan destruktif, namun lebih kepada ketegangan konstruktif. Persinggungan dengan budaya luar, pemikiran global, perilaku modern, membuat individu dalam masyarakat di segala klasifikasi melakukan informasi ideologi. Tindakan dan perilaku masyarakat Bulutana. Hal ini tentunya tidak mudah membalik telapak tangan, karena tentunya ada dilema tersendiri dari pengemban agen perubahan sebelum struktur, sikap nilai dan budaya.

Ketegangan rentan terjadi dalam masyarakat. Ketika berbenturan dengan jaman dan berbagai kepentingan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Seperti sekarang ini mereka bebas dengan objektivitas yang harus dilakukan. Orang dengan sendirinya mengambil keputusan untuk memperoleh pendidikan mencari dan mendapat pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan keuntungan sehingga penghargaan pun dapat mereka peroleh. Dengan objektivitas yang

hendak dilakukan, juga dilakukan oleh salah satu nara sumber yang mengatakan menikah dengan seorang diri golongan manapun tidak masalah, karena status itu ditentukan dari bagaimana bisa seseorang memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Ada beberapa hal yang menjadikan hal ini sekarang berubah. *Pertama*, jaman sudah berubah. Manusia bebas menentukan pilihannya. Jika tidak, fakta membuktikan banyak terjadi kawin lari sehingga orang tua menyadari kalau anak mempunyai pilihan atas hidupnya. *Kedua*, perjumpaan dengan etnis lain. Perjumpaan ini terjadi karena adanya migrasi. J. Dwi Narwoko – Bagong Suyanto, menyebutnya migrasi masuk (misalnya antar daerah yang berdekatan, dan migrasi keluar perpindahan penduduk dari satu populasi). Jadi adanya penduduk yang masuk dan keluar bisa saja karena adanya keinginan untuk merantau dinegeri orang dan bersosialisasi dengan budaya lain. Biasanya migrasi ini dilakukan mahasiswa-masiswi dari Bulutanah yang bersudi keluar kota. Selain itu ada pula penduduk masuk dalam populasi didaerah Bulutanah, untuk bekerja dan Berbagai kepentingan lainnya sehingga mereka berdomisili Bulutanah.

Masyarakat Sumba Timur juga mendapat effect dari globalisasi. Menurut Ronland Robertson, akan terjadi ketegangan besar ketika globalisasi merambah suatu bangsa, yaitu ketegangan individu versus masyarakat dunia modern. Biasanya muncul keinginan primordial untuk melawan globalisasi. Pertentangan ataupun perlawanan tidak bisa diartikan secara harafiah, pertentangan bisa berarti adanya keinginan masyarakat local dalam mempertahankan identitasnya “menjaga eksistensi masyarakat local.” Jadi masyarakat secara individu bebas menyaringnya

sesuai dengan nilai dan norma yang dipegangnya. Globalisasi kebudayaan juga bisa memberi dampak tatanan perekonomian.

Giddens mengatakan, globalisasi bukan hanya, atau bahkan terutama, tentang saling ketergantungan ekonomi, tetapi transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan kita.

Diikuti dengan kemajuan teknologi dalam arus globalisasi ini, juga menjadi faktor penting dalam pergeseran ini. Kelompok-kelompok yang hidup dalam lingkungan yang tradisional semakin pecah dengan akibatnya bahwa masing-masing individu semakin harus menghadapi tantangan-tantangan kehidupan secara individu. Keadaan demikian memacu individu untuk terus menghadapi tantangan dengan cara mereka.

Di area peradaban baru ini, IPTEK menjadi lokomotif penggerak zaman, dan IPTEK juga menjadi *icon* yang mewarnai peradaban baru umat manusia. Dan Bulatanah termasuk didalamnya dengan cara-cara hidup yang masih tradisional. Revolusi IPTEK telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan.

Keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal baru yang ditawarkan mencerminkan ciri hidup modern. Keterbukaan tidak begitu saja diperoleh tanpa aspek pendidikan yang di paparkan di atas. Perubahan-perubahan ini secara mendasar menyebabkan pula terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Perubahan baru ini membawa gaya hidup baru dalam kehidupan keluarga, cara kerja baru, kegiatan ekonomi baru, konflik-konflik baru, dan di atas

semuanya itu adalah sebuah kesadaran baru. Peradaban baru ini mengandung implikasi bahwa bagi mereka yang ingin berhasil meraihnya perlu mentransformasih dirinya.

Bapak Dedi sebagai masyarakat Bulutanah mengatakan:

“Masyarakat Bulutanah sendiri bersifat terbuka dan efektif, karna jika ia bersifat tertutup, bisa saja ia terisolasi dari perkembangan dunia. Orang Bulutanah dengan bebasnya menerawang wilaya kehidupan dunia luar dan menilai ini yang baik, ini yang tidak relevan lagi. Orang pake hp, nonton televisi, internet, bisa melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan zaman lagi. Orang mulai menyadari, untuk dilihat atau dipandang atau *survive* orang itu dengan mengikuti perkembangan zaman. Tidak membuang semua nilai budaya tetapi tidak secara terbuka tanpa filterisasi menerima teknologi yang mungkin saja merugikan”.

P.L Berger mengatakan, untuk dapat mencapai perubahan seperti negara-negara maju lainnya harus mencontihl langka-langka utama yang perna dilalui oleh masyarakat-masyarakat barat dalam pendakiannya dari keadaan miskin menjadi kaya. Bagi mereka “masyarakat Bulutanah” yang masuh sangat tradisional denag peralatan tradisional yang belum memadai pastinya mempunyai harapan untuk memiliki taraf hidup yang lebih baik.dengan terlibat dalam perkembangan jaman dengan berbagai penemuan baru yang dihasilkan, teknologi ini ternyata mampu mwmbawa masyarakat Bulutanah untuk hidup lebih produktif. Banyak toko elektronik,conter-conter handphone, warnet dimana-mana, dan lain sebagainya sebagai respon masyarakat terhadap perkembangan jaman. Dalam Bab II, Mudjia Rahardjo, menyebutkan bahwa teknologi adalah salah satu sumber

perubahan sosial. Menurut penulis, hal ini kemudian menyangkut juga dengan nilai ekonominya.

Dengan adanya kemajuan dalam pendidikan, iptek, tentunya memiliki dampak dalam ekonomi masyarakat. Petani-petani mulai menemukan bagaimana memperoleh kualitas hasil pangan yang bagus, meninggalkan alat tradisional untuk pertanian, dan orang-orang mulai menciptakan lapangan kerja kewirausahaan yang mandiri untuk bersaing dan survive dalam hidup. Dalam Bab II, mengatakan adanya bentuk *mobilitas sosial*. Adany upaya masyarakat untuk mengorganisasikan kehidupannya dengan memanfaatkan mobilitas sosial yang ada.

Berbicara mengenai ekonomi, berarti menyangkut kepemilikan. Masyarakat bersaing dalam hal ekonomi. Entah uang, barang, tokoh, conter, hewan dan asset-aset lainnya. Sekarang istilahnya tidak ada orang kaya yang mengikuti orang miskin, yang ada orang miskin yang mengikuti orang kaya, dan di Bulutanah itu sekarang sedang berlaku. Pemikiran yang sudah terkonstruksi oleh budaya (konstruksi awal bansawan dalam Bab III, adalah orang yang lihat dalam ekonomi, politik, dan sebagainya) bisa mempengaruhi konsep masyarakat, bahwa tingkat pencapaian ekonomi seseorang bisa di sejajarkan dengan bansawan. Orang Bulutanah mulai berlomba-lomba untuk ini. Menurut penulis, ini gejala umum yang terjadi dalam masyarakat, namun dalam kasus Bulutanah, ternyata gejala ini memberikan *impact* terhadap penilaian akan kreteria bansawan.

Pada hakikatnya terjadilah perubahan social ini juga karna adanya *confused in culture* dalam masyarakat Bulutanah. Seperti umumnya masalah local lainnya *local culture*, adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat setempat. Teori perubahan sosial dalam bab II mengatakan, perubahan yang terjadi adanya keterkaitan antara sistem sebelumnya. Jadi pandangan hidup yang termasuk segmen dalam sistem sosial masih berpengaruh dalam perhatian masyarakat akan kehidupan masa lalu. Bapak umbu Hamakonda mengatakan, adanya juga keterbatasan pemahaman masyarakat akan budayanya. Itulah mengapa statusnya social “bangsawan” dalam sistem social dahulu, diadopsi kedalam system social kemasyarakatan sekarang, yang berbeda syaratnya dalam ranah cultural. Itulah mengapa gelar bangsawan disejajarkan ketika seseorang mendapatkan status social tertentu dalam pemerintahan. Bahkan nama, gelar kebangsawanan dianulir olehnya. Pandangan umum masyarakat Bulutanah menyebut bangsawan ini dengan istilah *maramba bidi* (bangsawan baru)

Faktor lainnya adalah agama. Masuknya agama juga membawa pengaruh besar dalam masyarakat Bulutanah. Weber, dengan etika protestan mengisyaratkan dalam keseluruhan pendekatannya menekankan bahwa hubungan antara edial agama dan kepentingan ekonomi sebenarnya bersifat saling tergantung. Dengan klata lain, hubungan ini bersifat timbal-balik. Agama disini, dan dengan “agama” dimaksudkan di sini setiap sikap terhadap Tuhan. Setiap bentuk kepercayaan sejauh mendapat bentuk dalam kemasyarakatan “bukan individu” adalah saslak satu unsur dalam sistem sosial. Dan oleh karna itu

perubahan dalam sikap agama pun akan mempunyai peran dalam proses perubahan sosial.

Marx dengan ucapannya, bahwa agama itu candu masyarakat. Banyak filsuf Marxis seperti Ernest Bioch dan Milan machovec pun mengakui, bahwa agama dapat juga merupakan sesuatu ke kuatan yang revolusioner. Agama dapat mempertajam kesadaran, bahwa semua manusia sama-sama ciptaan tuhan dsan oleh karna itu sama derajatnya. Bahwa segala kekuasaan di dunia terbatas dan harus tunduk pada hukum tuhan dan moral. Bahwa setiap orang bernilai mutlat dan oleh karna itu berhak atas keadilan.

Agama yang masuk di Bulutanah juga memberikan kekuatan yang mampu mengubah masyarakat Bulutanah. Banyaknya orang bulutanah yang meninggalkan kepercayaan aslinya *marapu* dan memeluk agama impor “protestan” katolik dan islam.

Kalau mau di tilik dalam sejarah, segala aktifitas keseharian orang Bulutanah itu merupakan penyembahan kepada *marapu*. Dengan demikian hubungan antara struktur “antara raja dengan orang merdeka dan hamba” dalam sistem juga merupakan penyembahan kepada *merapu*. Membuktikan pengaruh agama agama sangat besar dalam masyarakat Bulutanah.terhususnya peran agama kristen protestan sebagai agama mayoritas di bulutanah.

Agama dapat memberikan semangat dan harapan untuk menghadapi semua kekuasaan di dunia dengan berani karena orang agama tidak takut mati. Karena wujud penyembahan yang kekal hanya kepada Tuhan bukan kepada

bangsawan. Agama dapat mempengaruhi perubahan sosial, entah untuk memperkuat struktur-struktur yang ada, atau malah meniadakan struktur-struktur yang tidak adil. Sekarang mayoritas agama Kristen protestan, katolik dan daerah pesisir pantai banyak ditempati oleh orang Islam. Agama dengan berbagai ajaran di dalamnya.

Perubahan sosial di Bulutanah masih terus akan mengalami proses perubahan. Karna masyarakat itu tidak statis. Perubahan ini tentu saja memberikan dampak dalam segala aspek kehidupan masyarakat bulutanah. Namun dalam acara adat dalam budaya itu sendiri, misalnya dalam upacara adat kampung yang masih sangat tradisional, loyalitas terhadap bangsawan yang masih tampak. Dengan demikian dalam rana culturah mereka yang di anggap bangsawan karena dalam lingkungan sosial, ekonomi, politrikl, tidak di akui.

Hal ini karna masih adanya nilai dan norma yang di anut oleh bangsawan yang masdih memelihara statusnya dalam kampungnya. Selain iti ini karna bentuk penolakan terhadaprealitas sosial yang ada walaupun pada dasarnya mereka mengetahui perubahan itu terjadi. Menurut penulis ini mungkin akan menjadi suatu penghambat menghacurkan struktur lama yang masih di anut oleh sebagian orang menjadi tolak ukur untuk tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang dalam rumah “ata” yang masxih mengikuti tuangnya, un tuk tidak meninggalkan tuangnya dengan tidak mempersiapkan mereka “ata” untuk memiliki kecakapan dalaqm keterampilan atau pendidikan untuk *survive* dan meningkatkan taraf hidup seperti masyarakat maju lainnya.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat bulutanah terhadap gelar kebangsawanan ini, menurut tipologi arah perubahan, termasuk di dalam tipologi linear, proses sosial yang mengarah mungkin bertahap, meningkat. Proses perubahan terhadap persyaratan gelar kebangsawanan ini bersifat *khaos*, dimana pergeseran gelar kebangsawanan ini di lihat dari terciptanya struktur sosial baru (orang biasa yang berpendidikan, jasa politik atau agama) dalam masyarakat Bulutanah. Hilangnya makna struktur sosialnya” khaos”

Proses perubahan ini terjadi dari dalam individu ini mungkin suatu saat akan menjadi agen kolektif, dimana adanya individu yang satu dan individu yang lain yang memiliki peran yang sama dalam menyikapi perubahan jaman. Suatu saat ini bisa menjadi bentuk perubahan yang *revolutif* yang merubah segala sistem sosial yang masih tradisional. Bentuk perubahan ini bukan dengan cara kekerasan atau pemberontakan seperti yang di jelaskan oleh perpektif *revolusi*, namun lebih kepada kesadaran individu secara menyeluruh sebagai agen kolektif, yang kemudian mengadakan perubahan secara radikal dalam kehidupan mereka secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat Bulutanah, akibat perubahan sistem yang lama menjadi sistem yang baru dengan struktur sosial yang baru sebagai akibat dari perubahan sosial tersebut. Mungkin suatu saat Bulutanah akan kehilangan gelar kebangsawanan ini.

B. Implikasinya terhadap perubahan sosial di Bulutanah

Melihat faktor-faktor penyebab di atas maka sudah pasti memberikan implikasi dalam masyarakat Bulutanah itu sendiri. Penulis membaginya dalam dua (2) bidang diantaranya:

1. Bidang sosial-ekonomi-politik

Dahulu kedudukan masyarakat di batasi oleh norma dan aturan adat berlangsung lewat status cultural ada. Penulis melihat, hal ini merupakan alat legitimasi bangsawan untuk mempertahankan *status quo* yang mereka miliki.

Melihat fenomena sosial dan arus perkembangan jaman dari waktu ke waktu, maka masyarakat Bulutanah sekarang itu terdiferensiasi berdasarkan kemampuan kecakapannya dalam masyarakat. semua orang bebas bersekolah. Fakta membuktikan banyaknya serkolah yang didirikan di Bulitanah, n mencerminkan perubahan masyarakat untuk mentransformasikan dirinya menjadi lebih cakap dalam bidang ilmu pengetahuan lewat sekolah-sekolah yang ada. Kemampuan yang mereka peroleh melalui media-media yang ada entah pendidikan forman, non formal, nelektron9ik dan alat-alat tehnologi lainnya memberikan kesempatan atau peluang kepada mereka untuk mencapai setiap keinginan yang mereka miliki.

Masyarakat yang leluhurnya dari golongan bawah bersekolah dan meraih prestasi atas kemampuannya. Banyak juga mereka yang mengorganisasikan dirinyua untuk memelihara hewan, bercocok tanam, membuka usaha-usaha kecil dan menengah untuk membuktikan kalau mereka juga mampu dan layak. Ketika mereka mampu dengan sendirinya banyak yang menggantungkan hidup kepada mereka.

Mereka bahkan sudah pernah dan semtara menjabat sebagai pegawai pemerintahan, dan jabatan-jabatan penting lainnya. Penghormatan dan penghargaan dengfan sendirinya mereka dapatkan. Ini hanya mungkin tercapai

karna kesadaran individual masyarakat itu sendiri dan di akui oleh berbagai faktor pendukung lainnya. Entah teknologi, peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku dan menjamin hak mereka secara penuh untuk menentukan hidup mereka.

Jadi sekarang ada *ata* tanpa *maramba*, dalam hal ini *ata* ataupun *kabihu* dapat berjalan sendiri bahkan mempunyai *ata* atau hamba sendiri. Adapun *maramba* tanpa *ata* karna tidakn cukup dalam hal finansial, entah ekonomi, jasa politik, dan sebagainya.

Selain itu, kemajuan dibidang perkawinan yang dahulu juga menjadi alat legitimasi kekuasaan para bangsawan untuk mempertahankan *status quo*.sekarang orang bebas menentukan dengan siapa ia hendak nikah.

Walaupun dalam realitas sosial, masih ada individu dalam masyarakat yang masih berfikiran sangat tradisonal. Namun kemajuan dalam segmen ini memberikan kesempatan kepada individu yang lain untuk lebih maju dari pemikiran tradisional ini.

Faktanya sudah di jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Bulutanah banyak yang menikah dengan etnis lain dan etnis Bulutanah tanpa melihat statusnya. Kitika dia mampu menunjukkan eksistengsinya sebagai manusia yang mampu menghidupi orang banyak, memiliki kekayaan yang banyak, sudah barang tentu dia dapatkan perlakuan khusus seperti bangsawan dan tak jarang mereka di sebut *maramba*”umbu dan rambu”

2.bidang agama

Kecakapan yang dimiliki dalam pendidikan juga membawa dampak dalam bidang agama. Bulutanah saat ini, banyak dipekerjai pendeta, guru injil, yang mengikuti pelayanan dalam Gereja kristen, Gereja bebas dan Gereja-Gereja lainnya.

Menurut *key Informan*, Bapak Umbu Makambombu dan Pdt Elias Rawambani, di daerah pedesaan, kampung-kampung tradisional dan Bagian kota sendiri banyak yang membantu Pelayanan Gereja dari golongan bawah. Mereka cakap dalam membaca memberitakan firman tuhan. Mereka sangat dihargai. Bahkan bisa dikategorikan bangsawan. Karena mereka didengar layaknya seseorang bangsawan memberikan nasehat dan teguran.

Umbu makambombu sebagai masyarakat Bulutanah mengatakan:
 “yah bisa juga pendeta dikategorikan maramba, hal ini karena dalam sejarah, pemimpin ibadat atau imam yang dalam bahasa sumba timurnya di panggil ratu adalah kelompok maramba.”

C. Refleksi Teologis

Fakta perubahan sosial adalah sesuatu yang tidak bisa kita tiadakan. Sadar atau tanpa kita sadari hal ini di terus merambah dalam kehidupan manusia. Mau terlibat atau tanpa kita sadari hal ini terus merambah dalam kehidupan manusia. Mau terlibat atau diam didalam keadaan kita adalah keputusan yang mau tidak mau tak dapat ditampilkkan.

Melihat perubahan yang terjadi di Bulutanah ini adalah hal yang tidak bisa dihindari Tugas kita adalah mengikuti arus perubahan itu dengan berbagai kendaraan yang akan kita tumpangi. Entah kereta, kuda, kuda, mobil, angkot atau berbagai macam kendaraan lainnya. Karena perubahan sosial tidak selamanya

mengandung hal positif, ada pula negative. Oleh karena itu sebagai umat kristen, perubahan ini membawa kita menyadari bahwa proses itu akan terus di alami oleh manusia dan menyikapinya lewat kendaraan kita sebagai orang kristen.

Untuk itu sebagai kaum beragama, penulis merasa untuk sampai kepada peniadaan sistem yang mendiskreditkan, mendiskriminasi, mensubordinasi orang banyak “buday stratifikasi,” mungkin dengan melewati proses perubahan lewat pergesernya gelar kebangsawanan ini, manusia akan menyadari akan dehumanisasi yang sudah dan sedang terjadi dan membawa masyarakat kearah perubahan yang memanusiakan manusia.

Untuk terus terlibat dalam perubahan ini penulis mengutip perkataan Gustavo Gutierrez,

Tegnologi merupakan refleksi kritis atas praxis orang beriman untuk pembebasan manusia, terutama miskin, dari ketidakadilan dan penindasan. Praxis ini merupakan perwujudan solidaritas yang mendapatkan inspirasi dari injil.

Jadi kita manusia dalam masyarakat, diharapkan dapat membantu perjuangan pembahasan yang dimasukdkan olah Guttierres. Perubahan ini belum mengarah kepada penghancuran sistem culture lama secara menyekuruh di Buluhtana, mengatakan masih ada daerah-daerah tertentu di Bulutanah. Dalam Bab III, kepala desa Bulutanah, mengatakan masih ada daerah-daerah tertentu di Bulutanah yangh masih keras sistem statifikasinya. Untuk itu sadar akan realitas yang ada masyarakat dapat membawa pembebasan bagi individu dalam masyarakat yang terkungkung dalam cangkang.

Teologi paulus juga berbicara tentang struktur dalam masyarakat “ tuan dan hamba.” Dalam galatia 3:28:

Dalam hal ini tidak orang yahudi atau orang yunani, tidak hamba atau orang merdeka, tidak laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus Yesus.

Hal yang dilakukan olehnya untuk menghilangkan berbagai perbedaan sosial tersebut dari kehidupan pribadi- pribadi Kristen dengan berdasarkan pada kesatuan dalam kritus. Mereka yang telah menerima kritus akan masuk kedalam dunia baru, dimana ciri-ciri yang paling menonjol dari identitas mereka adalah kesatuan mereka didalam kritus. Kesatuan dalam kritus inilah yang merubah segala perbedaan sosial.

Sebagai orang beragama terutama orang kristen, masyarakat bulutanah sudah seharusnya berperilaku seperti orang yang diajarkan Gutieres dan Paulus. Bukan malah membatasi, mendeskriminasi atau memanfaatkan tenaga mereka tanpa penghargaan yang layak. Untuk itu paulus menekankan perilaku individual sebagai actor yang melakukan perubahan.

Galatia mengatakan:

Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum kritus.

Ayat Alkitab ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat Bulutanah untuk membantu membawa masyarakat Bulutanah kepada perubahan Sosial yang sempurna. Saling tolong menolong menanggung beban sesama kita yang dirugukan dalam budaya sehingga kita pun mampu membawa perubahan sebagai bentuk perwujudan iman kita kepada Yesus Kristus.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Bulutanah kecamatan Kajuara kabupaten Bone. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Eksistensian kebangsawanan Di Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone berangkat dari sejarah kerajaan bone mengambil alih peran politik dan sosial kerajaan gowa pasca.
2. Dinamika posisi kebangsawanan terhadap posisi birokrasi, politik dan bidang kelembagaan lainnya di Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

Masyarakat Desa Bulutanah tidak dapat dipisahkan dari sistem pelapisan sosial. Pelapisan sosial dapat dipahami sebagai perbedaan kelompok orang menurut struktur atau rangking tertentu berdasarkan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, kekuasaan, prestise, kepercayaan dan sebagainya yang menandai adanya ketidaksetaraan di dalam masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan saran bahwa:

1. Sebagai masyarakat yang memiliki rasa empati sebaiknya tidak membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya karena setiap masyarakat diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing dan setiap masyarakat mempunyai nilai yang dapat dilakukan untuk orang banyak baik itu yang berasal dari golongan bangsawan atau yang berasal dari golongan non bangsawan.
2. Keterlibatan bangsawan pada posisi birokrasi, politik dan bidang kelembagaan di Desa Bulutanah hendaknya menyertakan masyarakat biasa kedalam struktur tersebut karena masyarakat tidak seharusnya melihat status sosial dan kedudukan. Pemerintah kabupaten Bone hendaknya memberikan keleluasaan bagi siapa saja yang mau menjabat sebagai kepala desa dan bergerak dalam birokrasi untuk memberikan kesempatan bagi siapa saja yang mau ikut andil dibidang masing-masing dengan tidak membedakan status sosial orang tersebut baik yang berasal dari kalangan bangsawan maupun non bangsawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Daymont, Cristine. 2008. *Metode Riset Kualitatif*. Jakarta: Bentang.
- Martono, nanang.2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, soerjono, DR.,Prof.2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meinanrno, Eko A dkk. 2011. *Masyarakat dalam Kebudayaan dan Masyarakat*.
- Ritzer, George. 2009. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, Elly M. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Saeni, Rahman. 2005. *Stratifikasi Sosial dan pergeseran Kerja Petani Luar Pertanian*. Jurnal Sosiologi Socius, Volume VII-Juni, p 67.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wardi. 2008. Ringkasan Materi Sosiologi. Jakarta: Graha Pustaka.
- <http://widodoiain.blogspot.com/2015/02/teknik-analisis-data-dalam-penelitian.html>
- <http://musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat
- <https://wekaindriani.wordpress.com/politik/stratifikasi-sosial-dalam-masyarakat/>
- <https://readyygo.blogspot.com/2016/10/perubahan-sosial-masyarakat.html>
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugihen, Bahrein T. 1994. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Waluya, Bagja. Sosiologi 3. 2009. *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas XII*. Jakarta : Pusat Perbukuan Depdiknas.

Veeger, Karel J, dkk. 1997. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Victory Jaya Abadi.

Giddens, Anthony, dkk. 2009. *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.

<https://www.kaskus.co.id/thread/54d30b3b0f8b461d718b4574/asal-usul-gelar-nama-quotandiquot-masyarakat-bugis-sulawesi-selatan/>

<https://mirnasari600.wordpress.com/2014/06/12/kasta-kasta-di-bone/>

<http://sosialbudaya1.blogspot.com/2015/10/nilai-nilai-sosial-budaya.html>

doyle Paul jahnsen, Teori Klasik Dan Modern (Jakarta: PT Gramedia,1986),253.

Soetomo, Masalah Sosial (Yogyakarta;Pustaka Pelajar,2010)







RIWAYAT HIDUP



ROSMIATI, Lahir di Cangkano pada tanggal 17 Mei 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara dari ibu yang bernama Hj.Kasmawati dan ayah yang bernama Syamsuddin. Mulai masuk ke jenjang pendidikan dasar di Mi 72 Abbumpungeng tahun 2002 sampai pada tahun 2008. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Kajuara sampai tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Sinjai dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sosiologi program Strata Satu (S1).

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis giat dalam mengikuti perkuliahan di kampus. Penulis menyelesaikan studi dengan menyusun skripsi yang berjudul *“Bangsawan di Tanah Adat (Studi Kasus Perubahan Nilai Sosial Pada Bangsawan di Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone”*